PERGESERAN ORGANISASI KECAMATAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Siti Asiah

ABSTRAK

Pasal 126 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar Lampung. Camat hanya mempunyai wewenang dari pendelegasian tugas dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah (hanya mempunyai wewenang delegatif).

Kata Kunci: *Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan, Perda Nomor 14 Tahun 2000*

A. PENDAHULUAN

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 sebagai hasil reformasi telah meletakkan landasan bagi penyelenggaraan asas otonomi dan tugas perbantuan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 telah ditentukan bahwa: "Pemerintah Daerah Propinsi Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan perbantuan". Dengan demikian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari Propinsi, kota dan Kabupaten, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota dibawah kecamatan, sedangkan Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten dan/atau kota. Pasal 18 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menghendaki penyelenggaraan otonomi yang utuh dan bulat pada daerah kabupaten dan daerah kota.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah pada Pasal 126 Ayat (1). Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pasal 126 Ayat (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dari ketentuan tersebut diatas, Camat tidak memiliki kewenangan atributif yaitu kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat yang lebih tinggi, seperti yang diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. melainkan hanya memiliki wewenang delegatif yaitu kewenangan yang berasal dari pendelegasian wewenang dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi, sesuai dengan maksud dari isi Pasal 126 Ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut status pemerintah kecamatan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang sebelumnya diberi posisi sebagai perangkat wilayah administrasi pemerintahan dalam rangka dekonsentrasi, mengalami pergeseran menjadi wilayah kerja dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Konsekwensi logis

dari perubahan tersebut diperlukan berbagai pengaturan, terutama menyangkut kewenangan, pengorganisasian, penyelenggaraan tugas-tugas umum, kepengawainan, serta pengukuran kinerja pengorganisasian kecamatan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menganut asas dekonsentrasi kekuasaan mengeluarkan peraturan tentang organisasi kecamatan yang diseragamkan dengan mengeluarkan Kepmendagri Nomor 45 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan. Peraturan ini telah mengalami pergeseran setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang diimplementasikan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan bunyi Pasal 126 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 126 Ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut di atas, Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar Lampung.

Penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000, Camat sebagai Kepala Pemerintahan Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut di atas, dikeluarkan keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 28 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Kota Bandar Lampung.

Sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat dikelompokkan dalam bidang sebagai berikut: pengembangan otonomi daerah, pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, penanaman modal dan koperasi usaha kredit menengah, seni dan budaya, pertanahan, pemukiman dan prasarana, pembangunan, lingkungan hidup, politik dalam negeri dan administrasi publik, pendapatan daerah, kependudukan dan transmigrasi, olah raga, hukum dan perundang-undangan, penerangan.

Camat merupakan kepala pemerintahan kecamatan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati. Dengan demikian kedudukan seorang kepala kecamatan sangatlah penting. Camat sebagai pemimpin kecamatan memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Camat mempunyai fungsi, tugas dan wewenang yaitu :

- penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada tingkat kecamatan berdasarkan kewenangan yang diberikan walikota;
- fasilitas pelaksanaan kewenangan teknis tertentu pada tingkat kecamatan;
- penyelenggaraan pembinaan kelurahan, ketentraman dan ketertiban;
- fasilitas lembaga kemasyarakatan;
- penyelenggaraan pelayanan umum;
- penyelenggaraan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Guna melaksanakan tugas pemerintahan Kecamatan menurut Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar Lampung dalam Pasal 9 disebutkan bahwa seorang Camat mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan pemerintah kelurahan;
- Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- Pembinaan pembangunan masyarakat kelurahan yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi, dan pembinaan pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup;
- Pembinaan kesejahteraan sosial;
- Pembinaan pelayanan umum;
- Penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Jadi kepemimpinan Camat sebagai Kepala Kecamatan merupakan faktor yang menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan yang dapat menentukan pula terhadap suksesnya koordinasi perencanaan dan pembangunan wilayahnya sesuai dengan pelimpahan wewenang yang diberikan Bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Mencermati paparan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- bagaimanakah pergeseran organisasi Pemerintah Kecamatan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang implementasinya dalam Perda Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar Lampung?
- bagaimana implikasi dari pergeseran organisasi kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Kecamatan?
- Apakah faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh Camat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan Daerah berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2004 di Kota Bandar Lampung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Analisis data secara kualitatif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Organisasi Pemerintah Kecamatan

Kewenangan Pemerintah Kecamatan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974

Desentralisasi adalah proses penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan segenap kepentingan sekelompok penduduk yang mendiami suatu daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Pengertian desentralisasi menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1974, Pasal 1 huruf e, adalah "Otonomi daerah, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan yang berlaku". Dari pengertian tersebut, desentralisasi merupakan penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, maka Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, meletakkan titik berat

otonomi pada Daerah Tingkat II, (Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974).

Pertimbangannya, adalah bahwa Daerah Tingkat II lebih langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan dapat lebih mengerti dan memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut. Selanjutnya untuk melaksanakan Pasal 11 Undang-Undang No 5 Tahun 1974, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, pada Pasal 72 Ayat 3, wilayah Kabupaten dan Kotamadya dibagi dalam wilayah-wilayah kecamatan, ini menyatakan bahwa kecamatan merupakan wilayah administratif pemerintah. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di perlukan kepala wilayah, Undang-Undang No 5 Tahun 1974 Pasal 77 tentang kepala wilayah,

- Propinsi dan ibukota negara disebut Gubernur.
- Kabupaten disebut Bupati.
- Kotamadya disebut Walikota.
- Kota administratif disebut Walikota.
- Kecamatan disebut Camat.

Pasal ini mengandung pengertian Camat sebagai kepala wilayah merupakan wakil pemerintah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan di wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Dalam menjalankan tugasnya, kepala wilayah bertanggungjawab langsung terhadap atasannya, hal ini diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang No 5 Tahun 1974 menyatakan:

- Kecamatan bertanggungjawab kepada Kepala Wilayah Kabupaten atau Kotamadya atau Kota Administratif yang bersangkutan;
- Kota Administratif bertanggungjawab kepada Kepala Wilayah Kabupaten yang bersangkutan;
- Kabupaten dan Kotamadya bertanggungjawab kepada Kepala Wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- Propinsi atau ibukota negara bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Kepala Wilayah memiliki kewenangan, tugas, serta kewajibannya sesuai dengan Pasal 81 Undang-undang No. 5 Tahun 1974:

- a. membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan pemerintah;
- b. melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang ideologi negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah;
- c. menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi-instansi vertikal dan antara instansi-instansi vertikal dengan dinas-dinas daerah, baik dalam pelaksanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;
- d. membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
- e. mengusahakan terus-menerus agar segala peraturan perUndang-undangan dan peraturan daerah serta pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk itu serta mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah;
- f. melaksanakan segala tugas pemerintah yang dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. melaksanakan tugas pemerintah yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi lainnya.

Pengaturan lebih lanjut tentang organisasi Kecamatan diatur langsung oleh Kepmendagri, sebagaimana tertuang dalam Kepmendagri No 46 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan.

Kepmendagri No 46 Tahun 1993, bagian ketiga tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Camat, Pasal 2 menyatakan:

- a. Camat adalah kepala Pemerintah Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati I Walikotamadya;
- b. Camat di wilayah Kotamadya/Kota Administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya.

Undang-Undang No 5 Tahun 1974, Pasal 77 tentang Kepala Wilayah, huruf (e) Kecamatan disebut Camat. Pasal 80 menyatakan Kepala Wilayah sebagai wakil pemerintah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan,

mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Susunan organisasi Kecamatan menurut Kepmendagri No 46 Tahun 1993, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian ketiga Kedudukan, Tugas dan Fungsi Camat, Pasal 2 Kepmendagri No 46 Tahun 1993 menyatakan:

- a. Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati I Walikotamadya.
- b. Camat di wilayah kotamadya/kota administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya.

Kewenangan Pemerintah Kecamatan Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, Pasal 1 huruf (m) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan Kota. Selanjutnya Pasal 66 Undang-undang No 22 Tahun 1999:

- a. Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;
- b. Kepala Kecamatan disebut Camat;
- c. Camat diangkat oleh Bupati Walikota atas usul Sekretaris Daerah dari pegawai negeri yang memenuhi syarat;
- d. Camat menerima sebagian wewenang dari Bupati/Walikota;
- e. Camat bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota;
- f. Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 126 Ayat (1) Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Sedangkan Ayat (2) menyatakan, Kecamatan

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh limpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pasal ini mengandung pengertian Camat hanya mempunyai wewenang delegatif, yaitu kewenangan yang diberikan dari pendelegasian wewenang dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi. Pengaturan lebih lanjut tentang Pemerintah Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah masing-masing Kabupaten/Kota, Kota.

Kota Bandar Lampung menetapkan Perda No 14 Tahun 2000, tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar Lampung, dan Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 28 Tahun 2001, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kota Bandar Lampung, sebagai pedoman bagi Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya.

Susunan organisasi Pemerintah Kecamatan Kota Bandar Lampung sesuai dengan Perda No 14 Tahun 2000, Pasal 6 tentang terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi pemerintahan;
- d. Seksi ketentraman dan ketertiban;
- e. Seksi pembangunan masyarakat;
- f. Seksi kesejahteraan sosial;
- g. Seksi pelayanan umum;
- h. Kelompok Jabatan fungsional.

Menurut Perda No 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar Lampung, pengertian dan susunan organisasi dinyatakan dalam Pasal 1 huruf (h). Camat adalah kepala kecamatan Kota Bandar Lampung, Pasal 6 huruf (a) sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat, Pasal 6 Ayat 2 huruf (b) seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada camat, melalui sekretaris kecamatan. Sedang pada Pasal 6 Ayat 3, kepada Camat dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.

Apabila diperhatikan lebih lanjut dari Kepmendagri No 46 Tahun 1993, tersebut secara struktural masih menjadi acuan bagi daerah Kota

Bandar Lampung dalam menyusun Perda No. 14 Tahun 2000, hal ini diakui oleh Bapak Ahmad Sutiono, (Sekretanis Kasubag Tata Pemerintahan Kota Bandar Lampung, bahwa pada saat penyusunan Perda No 14 Tahun 2000 ini, pemerintah Kota Bandar Lampung menggunakan pola pelayanan maksimum baik secara struktural maupun kewenangan yang dimiliki oleh Camat tidak ada perbedaan antara Kepmendagri No 46 Tahun 1993 dengan Perda No 14 Tahun 2000. Bahkan menurut Bapak Erwin (Kasubag Organisasi dan Tata Laksana Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandar Lampung, Camat sebagai kepala wilayah dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1974, dengan kecamatan sebagai wilayah kerja Camat sesuai dengan Pasal 1 huruf (e) Undang-undang No 22 Tahun 1999, perbedaan itu hanya pada teknis undang-undang saja, bukan pada struktural maupun wewenang yang dimiliki Pemerintah Kecamatan.

Pernyataan serupa pun diakui oleh Ibu Bayana (Sekretaris Kecamatan Kedaton), bahwa dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kecamatan mengacu pada Perda No 14 Tahun 2000. Namun ketika penulis menanyakan adakah perbedaan dalam pelaksanaan wewenang yang dimiliki Pemerintah Kecamatan dengan peraturan sebelumnya (Kepmendagri No 46 Tahun 1993), ia menyatakan tidak ada perbedaan, sampai saat ini Pemerintah Kecamatan hanya perpanjangan tangan dari Walikota terhadap pelayanan publik. Contoh: Camat masih PPAT, pengurusan masalah KTP, PBB, KK, Kebersihan, dan memberikan advis kepada dinas-dinas tertentu dalam hal pembangunan, menurutnya dari dulupun Pemerintah Kecamatan hanya mengurus permasalahan itu.

Perda Kota Bandar Lampung No 14 Tahun 2000 Pasal 1 huruf (c), menyatakan perangkat Daerah Kota adalah organisasi/ lembaga pada Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah Kota, Dinas Daerah Kota, Lembaga Teknis Daerah Kota, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah Kota.

Pengertian pasal tersebut di atas menyatakan bahwa Kecamatan merupakan salah satu dari Perangkat Daerah yang memiliki

kewenangan yang sama dengan Perangkat Daerah lainnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung. Namun pada dasarnya menurut Ahmad Sutiono (Sekretaris Kasubag Tata Pemerintahan Kota Bandar Lampung), kewenangan Kecamatan berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga teknis daerah lain yang memiliki kewenangan atributif dan kewenangan delegatif, sedangkan Kecamatan hanya memiliki kewenangan deligatif. Camat hanya menerima sebagian pelimpahan wewenang dari Walikota dalam menjalankan otonomi daerah, tanpa adanya pelimpahan wewenang dari Walikota, Camat dalam menjalankan aktivitasnya tidak sah.

Berdasarkan Pasal 3 Perda No 14 Tahun 2000, yang dimaksud Pemerintah Kecamatan adalah unsur perangkat daerah Kota yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Pasal 4 Perda No 14 Tahun 2000, tentang tugas pokok, Kecamatan mempunyai tugas pokok menjalankan sebagian wewenang pemerintah yang dilimpahkan oleh walikota, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta kehidupan kemasyarakatan kecamatan. Pasal ini mengandung pengertian bahwa Camat dalam menjalankan tugas pokok sebagai pimpinan pemerintah Kecamatan tidak memiliki kewenangan mengatur di daerah yang dipimpinnya karena Camat hanya menerima pelimpahan wewenang dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota.

Pasal 5 Perda No 14 Tahun 2000, untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. memimpin pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Kota di Kecamatan;
- b. membantu Sekretaris Kota dalam penyiapan informasi mengenai kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan Walikota;
- c. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas Kelurahan. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan, Perangkat Daerah dan instansi lainnya di Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah;

- d. pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam Kecamatan, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan pelayanan umum dan keagamaan.

Bila melihat fungsi kecamatan dalam pasal ini, Camat hanya mempunyai peranan dalam memimpin penyelenggaraan kebijakan-kebijakan Pemerintahan Daerah Kota di wilayah Kecamatan. Camat tidak memiliki daerah kewenangan di daerahnya sendiri, karena ia menerima sebagian wewenang yang dilimpahkan Walikota kepadanya.

Berikut tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh struktur kecamatan Kota Bandar Lampung menurut Perda No 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar Lampung.

Camat

Pasal 7 Perda No 14 Tahun 2000, Camat adalah kepala pemerintah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Sedang dalam Pasal 8 Perda No 14 Tahun 2000, Camat mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pemerintahan pembangunan kehidupan masyarakat Kecamatan.

Menurut Pasal 9 Perda No 14 Tahun 2000, untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Camat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan tugas-tugas umum dalam pembinaan pemerintah kelurahan;
- b. pembinaan ketentraman dan ketertiban kecamatan;
- c. pembinaan pembangunan masyarakat kelurahan yang meliputi sarana dan prasarana perekonomian, produksi dan pembinaan pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup;
- d. pembinaan kesejahteraan sosial;
- e. pembinaan pelayanan umum;
- f. penyusunan rencana program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. bila melihat tugas, fungsi dan wewenang camat sebagaimana tercantum dalam pasal di atas, Camat sebagai Kepala Pemerintah Kecamatan memiliki wewenang yang dilimpahkan Walikota kepadanya meliputi, memimpin penyelenggaraan tugas-tugas

umum pemerintah, pembina ketentraman dan ketertiban, pembina pembangunan masyarakat meliputi sarana dan prasarana perekonomian, produksi, dan pembinaan, pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup.

Sekretariat Kecamatan

Pasal 10 Perda No 14 Tahun 2000, Sekretaris Kecamatan bertugas memimpin sekretariat kecamatan dalam rangka membantu Camat di bidang administrasi dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan administrasi serta memberikan pelayanan teknis maupun administrasi kepada masyarakat dan instansi lainnya di tingkat kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Pasal 11 Perda No 14 Tahun 2000, sekretariat kecamatan mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. penyelenggaraan koordinasi hubungan kerja dengan perangkat daerah dan instansi di tingkat kecamatan;
- c. mengkoordinasikan penyusunan program kerja, perumusan dan perencanaan kebijakan teknis pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- d. penyelenggaraan urusan tata usaha, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan urusan rumah tangga kecamatan.

Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai mana tercantum dalam Pasal 12 dan 13, Perda No 14 Tahun 2000:

- a. melaksanakan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintah kelurahan, pembinaan administrasi pemerintah kelurahan;
- b. Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan.

Fungsi Seksi Pemerintahan menurut Pasal 13 Perda No 14 Tahun 2000:

- a. untuk mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi perangkat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintah dan penyusunan rencana program maupun petunjuk teknis pembinaan sarana dan prasarana fisik pemerintah;
- b. pengumpulan bahan dan menganalisa data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat dari lembaga kelurahan;
- c. pengumpulan bahan dan petunjuk teknis penyelenggaraan tata pemerintah kelurahan;
- d. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggunaan administratif pemerintah kelurahan, keagrariaan, kependudukan dan catatan sipil;
- e. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan kelurahan serta lembaga kelurahan;
- f. Pengumpulan bahan dan pencalonan, pengusulan, dan pengangkatan serta pemberhentian kepala kelurahan, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan pembinaan perangkat kelurahan;
- g. Penyusunan program kegiatan sosial politik ideologi dan kesatuan bangsa serta pengawasan aliran keagamaan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok dan fungsi tugas pokok sesuai dengan Pasal 14 Perda No 14 Tahun 2000:

- a. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pembinaan Polisi Pamong Praja kecamatan;
- b. seksi keamanan dan ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan.

Fungsi seksi keamanan dan ketertiban sesuai dengan Pasal 15 Perda No 14 Tahun 2000, adalah:

- a. pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemerintahan;

- b. pengumpulan bahan dan petunjuk teknis serta pelaksanaan pembinaan polisi pamong praja kecamatan;
- c. pengumpulan bahan dan petunjuk teknis serta pelaksanaan penegak dan pengamanan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pembangunan Masyarakat

Seksi pembangunan masyarakat mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai maim dalam pasal 16 Perda No 14 Tahun 2000:

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang pembangunan ekonomi dan sosial budaya, pemberdayaan masyarakat desa;
- b. seksi pembangunan masyarakat dipimpin oleh kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan.

Seksi pembangunana masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan bahan koordinasi dan penyusunan program tahunan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- b. pengumpulan bahan dan pengadministrasian program bantuan pembangunan kecamatan;
- c. pengumpulan bahan dan petunjuk teknis serta pembinaan program tahunan pembangunan daerah;
- d. pengumpulan bahan dan pembinaan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pembangunan pada masyarakat;
- e. pengliputan bahan dan pembinaan petunjuk teknis pemberian motivasi serta pengembangan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan;
- f. pengumpulan bahan dan pembinaan petunjuk teknis pelestarian dan pengembangan tradisi dan budaya masyarakat.

Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi kesejahteraan sosisal mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dalam Pasal 18 dan 19 Perda No 14 Tahun 2000.

Tugas pokok Seksi Kesejahteraan Sosial, Pasal 18 Perda No 14 Tahun 2000

- a. seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi kegiatan dan penyusunan program pembinaan

pelayanan bantuan sosial, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemuda dan olahrag,a, keagamaan serta pemberdayaan perempuan;

- b. seksi kesejahteraan sosial dipimpin oleh kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris kelurahan.

Fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial, Pasal 19 Perda No 14 tahun 2000:

- a. Penyiapan bahan kegiatan penyusunan program dibidang pelayanan dan bantuan sosial, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, di bidang keagamaan.
- b. penyiapan bahan kegiatan penyusunan program dibidang kesehatan, keluarga berencana dan bidang kesejahteraan;
- c. penyiapan bahan kegiatan penyusunan program dibidang pemberdayaan perempuan;
- d. penyiapan bahan kegiatan penyusunan program di bidang pelayanan kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat.

Seksi Pelayanan Umum.

Seksi pelayanan umum mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana teruang dalam Pasal 20 Perda No 14 Tahun 2000:

- a. Seksi pelayanan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan umum meliputi kekayaan dan inventaris Kelurahan, pembinaan kebersihan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- b. Seksi pelayanana umum dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugas bertanggungjawab kepada Camatl rnelalui Sekretaris Kelurahan.

Fungsi Seksi Pelayanan Umum meliputi antara lain:

- a. penyusunan program dan pelayanan umum pembinaan kekayaan dan inventaris kelurahan;
- b. pelaksanaan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
- c. pelaksana pembinaan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum.

Implikasi Perubahan Organisasi Kecamatan

Undang-undang No 5 Tahun 1974, Pasal 77 tentang kepala wilayah, huruf (e) Kecamatan disebut Camat, Pasal 80 Undang-undang No 5 Tahun 1974, menyatakan Kepala Wilayah sebagai wakil pemerintah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Pengaturan lebih lanjut diatur oleh Kepmendagri No 64 Tahun 1993 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan.

Undang-undang No 22 Tahun 1999, Pasal 1 huruf (m) Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan kota. Sedangkan dalam Pasal 66 Undang-undang No 22 Tahun 1999:

- a. Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;
- b. Kepala Kecamatan disebut Camat;
- c. Camat diangkat oleh Bupati/ Walikota atas usul Sekretaris Daerah dari pegawai negeri yang memenuhi syarat;
- d. Camat menerima sebagian wewenang dari Bupati/Walikota;
- e. Camat bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota;
- f. Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

*Undang-undang No 32 Tahun 2004 Pasal 126 Ayat (1) menyatakan Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Sedangkan Ayat (2) menyatakan, Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh seorang Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dengan demikian Kecamatan hanyalah wilayah kerja Camat yang tidak memiliki daerah kewenangan, karena Camat bukan kepala wilayah yang membawahi lurah atau kepala desa. Camat hanya menjalankan wewenang yang diberikan Bupati/Walikota kepadanya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Berdasarkan pasal tersebut di atas pengaturan lebih lanjut tentang Pemerintah

Kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah masing-masing Kabupaten/Kota. Kota Bandar Lampung telah menetapkan Perda No 14 Tahun 2000, tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar Lampung, dan Keputusan Walikota No 28 Tahun 2001, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kota Bandar Lampung.

Menurut penulis makna yang terkandung dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974, pemerintah kecamatan ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia yang dituangkan melalui Kepmendagri No. 46 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dari Kerja Pemerintah Kecamatan, dengan lahirnya Undang-undang No 22 Tahun 1999 dan dirubah dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, secara jelas daerah diberi wewenang untuk menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan potensi, keragaman dan kebutuhan daerah.

Menurut pengamatan penulis Perda No 14 Tahun 2000, Kota Bandar Lampung baik struktur organisasi dan kewenangan Pemerintah Kecamatan disusun berdasarkan Kepmendagri No 46 Tahun 1993, yang dituangkan dalam Perda tersebut. Bahkan menurut Bapak Erwin, (Kasubag Organisasi dan Tata Laksana Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandar Lampung), Camat sebagai kepala wilayah dalam Undang-undang No 5 Tahun 1974, dengan Kecamatan sebagai wilayah kerja Camat sesuai dengan Pasal 1 Huruf (e) Undang-Undang No 22 Tahun 1999, Perbedaan itu hanya pada tehnik undang-undang saja, bukan pada struktural maupun wewenang yang dimiliki pemerintah kecamatan.

Menurut Camat Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung Bapak Gumsoni As, pada saat pelaksanaan Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, wewenang pemerintah kecamatan Kota Bandar Lampung, sesungguhnya telah di batasi, Camat bukanlah kepala wilayah yang memiliki kewenangan di wilayahnya, melainkan pada saat itu Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagai penerima kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota. Sehingga pada saat penulis menanyakan apakah ada perubahan pelaksanaan organisasi pemerintah kecamatan di Kota Bandar Lampung dan Undang-undang No 5 Tahun 1974, yang di

implementasikan oleh Kepmendagri No 46 Tahun 1993 tentang Pedoman organisasi kerja Pemerintah Kecamatan, dengan Undang-undang No 22 Tahun 1999 yang diimplementasikan dengan Perda No 14 Tahun 2000, tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar Lampung, beliau menyatakan tidak ada perbedaan, baik secara struktural, tugas, fungsi dan kewenangan Pemerintah Kecamatan di Kota Bandar Lampung.

Pernyataan serupa diakui oleh Ibu Bayana, (Sekretaris Kecamatan Kedaton), bahwa dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kecamatan mengacu pada Perda No 14 Tahun 2000. Namun ketika penulis menanyakan adakah perbedaan dalam pelaksanaan wewenang yang dimiliki pemerintah kecamatan dengan peraturan sebelumnya (Kepmendagri No 46 Tahun 1993), ia menyatakan tidak ada perbedaan, sampai saat ini pemerintah kecamatan hanya perpanjangan tangan dari walikota terhadap pelayanan publik, contoh: camat masih PPAT, pengurusan masalah KTP, PBB, KK, Kebersihan, dan memberikan advis (keterangan mengetahui) kepada dinas-dinas tertentu dalam hal pembangunan, menurutnya dari dulu pemerintah kecamatan hanya mengurus permasalahan itu.

Dari ketiga pendapat tersebut di atas tampak bahwa pada saat berlakunya Undang-undang No 5 Tahun 1974, kewenangan pemerintah kecamatan Kota Bandar Lampung pada tataran prakteknya telah di batasi, camat bukan kepala wilayah yang memiliki daerah kewenangan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut, camat pada saat itu pun sudah sebagai penerima kewenangan yang dilimpahkan walikota, berarti pada saat berlakunya Undang-undang No 5 Tahun 1974, telah terjadi penyimpangan makna yang terkandung di dalamnya oleh pemerintahan Kota Badar Lampung.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Pemerintah Kecamatan Kota Bandar Lampung, masih menggunakan pola dan tata kerja yang sama dengan pada saat berlakunya Undang-undang No 5 Tahun 1974, yaitu sebagai penerima kewenangan yang dilimpahkan Walikota, sehingga menurut penulis Undang-undang No 22 Tahun

1999 dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, pasal yang berkaitan dengan Pemerintah Kecamatan lahirnya terlambat, karena sebelum undang-undang ini diberlakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah menerapkan makna yang terkandung di dalamnya.

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Camat dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat dalam Pemerintahan Daerah

Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Camat dalam Pemerintahan Daerah yaitu:

- a. adanya faktor sumber daya manusia yang cukup memahami ketentuan Peraturan daerah Kota Bandar Lampung No. 14 tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kota Bandar Lampung;
- b. adanya bantuan dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait;
- c. tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan kerja.

Faktor Penghambat

Hasil wawancara dengan Ibu Bayana selaku Sekretaris Kecamatan bahwa sektor penghambat dari tugas dan fungsi Camat dalam Pemerintahan Daerah yaitu:

- a. kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan hal ini dapat dilihat kurangnya kesadaran untuk membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
- b. kurangnya sosialisasi tentang pentingnya tugas dan fungsi Camat sebagai pelayan masyarakat di kecamatan berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandar Lampung, sehingga masyarakat kurang memahami tugas dan fungsi Camat yang akhirnya berakibat terganggunya pembangunan dan pelayanan di tingkat kecamatan.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Pasca ditetapkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Camat adalah pelaksana tugas yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya hanyalah menerima pendelegasian dari Bupati/walikota. Pengaturan lebih lanjut diimplementasikan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi kecamatan dan kelurahan di kota Bandar Lampung. Pengaturan demikian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran kedudukan Camat yang semula mempunyai wewenang atributif menjadi hanya wewenang delegatif.

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pengaturan lebih lanjut diimplementasikan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Bandar Lampung, mengalami pergeseran struktur organisasi kecamatan tetapi dalam pelaksanaannya tidak mempunyai implikasi terhadap tugas, fungsi dan kewenangan camat dalam melaksanakan tugasnya dari peraturan sebelumnya.

Terdapat beberapa faktor pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dalam pemerintahan daerah Kecamatan di Kota Bandar Lampung, yaitu adanya faktor sumber daya manusia yang cukup memahami ketentuan Peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 14 tahun 2000 tentang organisasi dan tata kerja pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan kota Bandar Lampung; adanya bantuan dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait; dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan kerja.

Terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dalam pemerintahan daerah Kecamatan di Kota Bandar Lampung yaitu: kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung; serta kurangnya sosialisasi tentang pentingnya tugas dan fungsi Camat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandar Lampung, sehingga masyarakat kurang memahami tugas dan fungsi camat akibatnya terganggu pembangunan dan pelayanan di tingkat kecamatan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- hendaknya dalam penyelenggaraan tugas-tugas Camat dalam pemerintahan daerah perlu adanya pengawasan dan peningkatan yang lebih optimal;
- hendaknya diadakan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 kepada masyarakat, agar pelaksanaan tugas dan fungsi camat dapat dilaksanakan dengan baik dan pelayanan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan maksud peraturan perUndang-undangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Suryaningrat. *Desa dan Kelurahan Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979*. Jakarta 1980.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah 1903-2001)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Kartono, Kartini, 1996. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. CV. Rajawali. Bandung.
- Nasir, Moh. 1998, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Suryaningrat, bayu. 1981 : 1. Wewenang tugas dan kewajiban Camat, Patco, Jakarta
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 28 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Kota Bandar Lampung.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar Lampung.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 3 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandar Lampung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya DATI II Tanjung Karang Teluk Betung.